

## **GATOT SUBROTO: PERAN DALAM PENUMPASAN PEMBERONTAKAN PKI DI MADIUN TAHUN 1948**

Oleh: Neilia Kamal, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [neilia207@gmail.com](mailto:neilia207@gmail.com)

### **Abstrak**

Indonesia pada masa awal kemerdekaan menghadapi instabilitas keamanan yang salah satunya disebabkan oleh pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Pengerahan pasukan militer untuk menumpas pemberontakan segera dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Gatot Subroto yang ditunjuk sebagai Gubernur Militer II mendapat mandat untuk memimpin penumpasan pemberontakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biografi Gatot Subroto, latar belakang pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, dan peran Gatot Subroto dalam penumpasan pemberontakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Gatot Subroto yang terpilih sebagai Gubernur Militer II memiliki peran dalam menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Sebagai penanggung jawab operasi penumpasan, Gatot Subroto menetapkan strategi poros gerakan dengan mengandalkan pasukan cadangan strategis yang bergerak secara cepat, Komando Reserse Umum. Mengerahkan pasukan dari tiga titik untuk menyerang secara cepat dan mengepung pasukan pemberontak agar terdesak menuju *Killing ground* sehingga terpaksa menyerah kepada TNI. Lewat siasat tersebut, operasi penumpasan berhasil dilaksanakan. Madiun dapat dikuasai dalam waktu yang singkat, melumpuhkan pasukan pemberontak, mengamankan wilayah yang menjadi basis pemberontakan, meminimalisir korban dari pihak TNI tidak terlalu banyak serta penangkapan seluruh pihak yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun. Baik terlibat langsung maupun tidak. Peran Gatot Subroto juga terlihat dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan penting.

**Kata Kunci:** *Gatot Subroto, Pemberontakan PKI, Madiun 1948*

## ***GATOT SUBROTO: THE ROLE IN CRUSHING OF PKI UPRISING IN MADIUN 1948***

### ***Abstract***

*Indonesia in the early days of independence faced instability of equality, one of that was caused by the PKI rebellion in Madiun in 1948. The deployment of military forces to quell the uprising was immediately undertaken by the central government. Gatot Subroto who appointed as Military Governor II got the mandate to lead the crackdown of rebellion. This study aims to determine the biography of Gatot Subroto, the background of the PKI rebellion in Madiun in 1948, and the role of Gatot Subroto in the rebellion crackdown. This research uses historical research method. The results of this study indicate that Gatot Subroto who was elected as Military Governor II has a role in crushing the PKI rebellion in Madiun. In charge of the crackdown, Gatot Subroto establishes the axis of the movement by relying on a rapidly moving strategic reserve force, the General Detective Command. Held troops from three points to attack quickly and besieged the rebel army in order to push towards Killing ground and forced to surrender to the TNI. Through this strategy, the crushing operation was successfully implemented. Madiun could be ruled in a short time, paralyzing the rebel forces, securing the territory that became the base of rebellion, minimizing the casualties of the TNI not too much and the arrest of all those who were perceived to be involved in the PKI rebellion in Madiun. Whether directly involved or not. The role of Gatot Subroto is also seen with the issuance of several important policies.*

**Keywords:** *Gatot Subroto, PKI Uprising, Madiun 1948*

## PENDAHULUAN

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, kondisi keamanan negara mendapat ancaman dari beberapa pihak. Pemerintah Republik Indonesia berusaha mengatasi instabilitas keamanan melalui beberapa jalan, di antaranya yaitu diplomasi dan perjuangan fisik dengan mengerahkan kekuatan militer. Ancaman dari Belanda kemudian datang pada 21 Juli 1947 melalui agresi militer yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda I. Agresi yang dilancarkan Belanda terhadap Republik Indonesia berakhir melalui Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948. Perundingan Renville melibatkan pihak Republik Indonesia diwakili Amir Syarifuddin selaku perdana menteri, dan pihak Belanda diwakili Abdulkadir Wijoyoatmojo.<sup>1</sup>

Perjanjian Renville menimbulkan gelombang protes dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan hasil perundingan. Perjanjian yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin membawa dampak kerugian besar baik secara politik, militer maupun ekonomi bagi Republik Indonesia dan memaksa Amir Syarifuddin menyerahkan jabatannya pada 23 Januari 1948.<sup>2</sup> Pengganti Amir Syarifuddin adalah Mohammad Hatta sebagai perdana menteri yang mendapatkan dukungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) serta Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan tidak mengikutsertakan Sayap Kiri<sup>3</sup>, sehingga Sayap Kiri mengambil peran sebagai oposisi.

Sayap Kiri bertransformasi menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada Februari 1948, dengan Amir Syarifuddin sebagai pemimpinnya.<sup>4</sup> FDR kemudian melakukan agitasi untuk menentang kebijakan Kabinet Hatta. Dimulai dari kampanye

<sup>1</sup> Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Pembangunan Gunung Sahari, 1984), hlm. 25.

<sup>2</sup> Jacques Leclerc, *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, (Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1996), hlm. 25.

<sup>3</sup> Sayap Kiri adalah organisasi politik dan organisasi masyarakat yang berhaluan komunis seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Sosialis, SOBSI, Pesindo, Barisan Tani Indonesia, Lasykar Rakyat dan GRI. Lihat A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 7 Periode Renville*, (Bandung: DISJARAH AD dan Penerbit Angkasa Bandung, 1978), hlm. 32.

<sup>4</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm. 341.

anti Kabinet Hatta termasuk menentang program yang diusung Kabinet Hatta dan mempolitikasi pemogokan buruh di Delanggu pada Juni-Juli 1948.<sup>5</sup> Selain agitasi, sisast militer telah dipersiapkan dengan matang. Siasat militer meliputi penarikan pasukan militer pendukung FDR dari front pertempuran, menetapkan Madiun sebagai basis gerilya jangka panjang dengan menempatkan kekuatan militer di dalamnya hingga menjadikan wilayah Surakarta sebagai *wild west* (daerah mengalih perhatian).<sup>6</sup>

FDR terus melakukan aksi menentang Kabinet Hatta dan kemudian mendapat pengaruh dari Musso yang dikenal sebagai tokoh PKI (Partai Komunis Indonesia) pada masa kolonial. Setelah kembali dari Moskow pada 11 Agustus 1948. Musso kemudian melakukan konsolidasi, menyatukan seluruh gerakan kiri ke dalam PKI tunggal. Musso kemudian menjadi sekretaris jenderal PKI pada 1 September 1948 dan menetapkan "Jalan Baru untuk Republik", sebagai garis haluan partai.

Kebangkitan Sayap Kiri melalui konsolidasi yang digagas Musso bersamaan dengan meletusnya kerusuhan bersenjata di Surakarta. Kerusuhan terjadi antara Divisi Panembahan Senopati pendukung PKI dan Divisi Siliwangi yang setia pada Republik Indonesia yang didalangi oleh konflik ideologi politik yang masuk dalam lingkungan militer. Keheterogenan pasukan tentara di Surakarta terjadi akibat dari Perjanjian Renville yang menyebabkan Divisi Siliwangi yang semula berkedudukan di Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah guna mematuhi isi perjanjian tersebut. Divisi Siliwangi ditempatkan di

<sup>5</sup> Pemogokan buruh di Delanggu terjadi pada pabrik kapas dan karung goni merupakan agitasi terbesar yang terjadiselama tahun 1948. Didalangi oleh FDR yang menunggangi Lembaga Buruh dan Tani (LBT) untuk yang menginginkan agar adanya peningkatan taraf hidup mereka sebagai buruh baik dari segi upah maupun tunjangan. Ketika pemogokan berlangsung, buruh Islam yang tergabung dalam Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) datang menggantikan pekerjaan buruh LBT. Namun, malah terjadi konflik yang mengakibatkan tewasnya buruh STII, sehingga Perdana Menteri Hatta harus mengerahkan kekuatan TNI untuk mengendalikan keamanan di sekitar pabrik. Pemogokan ini berakhir setelah pemerintah memenuhi tuntutan buruh LBT. Julianto Ibrahim, *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2014), hlm. 79.

<sup>6</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 1988), hlm. 33.

wilayah Surakarta berdampingan dengan Divisi Panembahan Senopati yang merupakan pasukan asli di wilayah Surakarta.

Kerusuhan terus berlanjut hingga keterlibatan dan pengaruh PKI semakin besar dibarengi dengan usaha untuk menjalankan siasat politiknya. Meluasnya kerusuhan hingga ke wilayah lain di sekitar Surakarta menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengerahkan kekuatan militer. Di sini Gatot Subroto kemudian muncul sebagai tokoh penting dalam meredam kerusuhan yang berakhir setelah dipercaya menjadi Gubernur Militer wilayah Semarang-Surakarta. Penyelesaian konflik di Surakarta bersamaan dengan aksi perebutan kekuasaan melalui pemberontakan oleh PKI dan simpatisannya. Pemberontakan PKI merupakan aksi utama yang berhasil disamakan dengan peristiwa di Surakarta. Penelitian ini memfokuskan pada peran Gatot Subroto dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun 1948 dalam tugasnya sebagai penanggung jawab operasi penumpasan atas kedudukannya sebagai Gubernur Militer.

#### METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah kegiatan pengumpulan sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber yang dikumpulkan disesuaikan dengan topik penelitian yang akan ditulis. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari berbagai tempat, seperti perpustakaan, museum, dan buku-buku koleksi pribadi peneliti. Sumber sejarah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder.

Sumber primer adalah sumber sejarah yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyewitness*).<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan sumber primer yang diperoleh dari berbagai tempat, antara lain.

Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, *Instruksi bagi Gubernur Militer Surakarta dan Semarang dari Wakil*

*Presiden Mohammad Hatta tertanggal 16 September 1948.*

\_\_\_\_\_, *Surat Keputusan Presiden No. 72/A.Mil./48 tentang pembentukan daerah militer Surakarta dan Semarang tertanggal 16 September 1948.*

\_\_\_\_\_, *Surat Keputusan Presiden No. 73/A.Mil./48 tentang Pengangkatan Gubernur Militer Surakarta tertanggal 16 September 1948.*

\_\_\_\_\_, *Perintah Harian No. 72/ P. B./48/I dari Soedirman tertanggal 19 September 1948.*

Koleksi Arsip Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, *Riwayat Hidup Gatot Soebroto.*

Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang disampaikan bukan oleh orang yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah.<sup>9</sup> Setelah heuristik dilakukan kritik terhadap sumber yang akan digunakan dalam penelitian yang akan menghasilkan fakta sejarah. Kritik sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

Kritik eksternal dilakukan dengan cara verifikasi atau pegujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.<sup>10</sup> Dalam hal ini, keaslian sumber dari segi fisik dapat dilihat dari jenis kertas, hingga bentuk tulisan yang disesuaikan dengan tahun penulisan. Kritik eksternal akan menghasilkan sumber sejarah yang otentik. Sedangkan kritik intern yang dilakukan untuk melihat dari sudut pandang isi atau substansi dari dokumen dapat dilihat dengan mengkomparasikan data tersebut dengan data lain. Kritik intern akan menghasilkan sumber sejarah yang kredibel

Interpretasi merupakan bagian dari metode sejarah yang bertujuan untuk menafsirkan fakta sejarah. Kemampuan mengumpulkan sumber dalam hal ini harus disertai dengan kemampuan menjelaskan.<sup>11</sup> Interpretasi dalam penelitian ini terdiri dari dua unsur, yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan fakta sejarah berdasarkan sumber, sedangkan sintesis adalah menyatukan beberapa fakta sejarah yang ada dan

<sup>7</sup> Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

<sup>8</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 55.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 104.

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 139.

penciptaan fakta sejarah baru dengan penafsiran. Setelah interpretasi selesai dilakukan tahap akhir yaitu historiografi. Historiografi dalam bentuk karya sejarah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pendidikan dan Karir Kemiliteran Gatot Subroto

Gatot Subroto lahir di desa Tanjung kecamatan Jatilawang, Purwokerto pada 10 Oktober 1909.<sup>12</sup> Pada awalnya, Gatot Subroto memiliki nama lahir Soebroto yang diberikan kedua orang tuanya. Ayah Gatot Subroto bernama Sayid Yudoyuwono merupakan seorang guru di *Tweede Inlandse School* atau lebih dikenal dengan nama Sekolah Kelas Dua di Banyumas. Sayid Yudoyuwono memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga beliau menaruh perhatian yang tinggi pada pendidikan anak-anaknya terutama bagi Gatot Subroto.

Masa kecil Gatot Subroto dihabiskan di Banyumas. Seperti anak-anak pada umumnya, Gatot Subroto juga gemar bermain permainan tradisional. Selain memiliki kegemaran bermain, Gatot Subroto juga gemar menangkap ikan di Sungai Serayu yang kemudian dibakar bersama teman sebayanya. Gatot Subroto selalu menjadi pembela bagi teman-temannya ketika diolok-olok oleh anak-anak Belanda. Hal ini membangun pribadi Gatot Subroto menjadi orang yang mengayomi dan mudah disenangi.

Gatot Subroto yang merupakan anak sulung memiliki tujuh saudara kandung. Empat orang laki-laki dan tiga orang perempuan yaitu Soewondo, Soenyoto, Soeparyono, Soeyono, Soeyati, Soepartinah, dan Soepartinah Soebardi.<sup>13</sup> Masa kecil Gatot Subroto dihabiskan di Banyumas dan menerima pendidikan formal. Ketika berusia lima tahun, Gatot Subroto oleh ayahnya disekolahkan di *Frobel School* Banyumas atau pendidikan taman kanak-kanak. Ia bersekolah di *Frobel School* selama dua tahun. Pada tahun 1916, Gatot Subroto terdaftar sebagai murid di *Europese Lagere School* (ELS), meskipun tidak cemerlang dalam pelajaran, nilai yang didapatnya tidak mengecewakan. Gatot Subroto pada akhirnya tidak menyelesaikan pendidikan di ELS hingga tamat karena ia terlibat perkelahian dengan salah satu anak Residen Banyumas yang mengakibatkan ia dikeluarkan dari

sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang diterima oleh Gatot Subroto karena tanpa proses pengusutan yang semestinya, Gatot Subroto harus menerima hukuman terberat.

Gatot Subroto kemudian melanjutkan pendidikannya di *Hollands Inlandse School* (HIS) Banyumas. Masa studi Gatot Subroto di HIS Banyumas tidak lama karena ia masih merasa tidak nyaman. Gatot Subroto pindah ke HIS Cilacap dan berhasil menamatkan pendidikannya pada 1927. Setelah lulus, Gatot Subroto memilih untuk bekerja menjadi pegawai di kantor Asistes Residen Cilacap, meski tidak bertahan lama. Ia kemudian bekerja di Pelabuhan Cilacap, dan pada saat itu juga mendapat pandangan bahwa ia ingin menjadi serdadu atau tentara. Atas bantuan dan dukungan sepupunya, yaitu Soetarman, pada bulan Desember 1928, Gatot Subroto terdaftar sebagai taruna militer.

Gatot Subroto terdaftar sebagai taruna militer di Sekolah *Aanbevolen Militair* di Magelang untuk menjadi serdadu *Koninklijke Nederlands Indische Leger* (KNIL). *Koninklijke Nederlands Indische Leger* merupakan angkatan bersenjata Hindia Belanda dibentuk pemerintah Kolonial Belanda sejak 1830 dengan tujuan menghadapi perlawanan bumiputera yang mana anggota KNIL sebagian besar terdiri atas prajurit rendahan bumiputera.<sup>14</sup> Setelah menempuh pendidikan selama dua setengah tahun, akhirnya Gatot Subroto lulus pada tahun 1931 dan resmi menjadi tentara KNIL dengan pangkat sersan bumiputera kelas dua.<sup>15</sup> Gatot Subroto kemudian ditugaskan di Padang Panjang yang terletak di tengah kota-kota besar di Sumatera Barat seperti Bukittinggi, Batusangkar, Solok dan Padang.

Pada 1934 Gatot Subroto dipanggil untuk melanjutkan pendidikan di sekolah Polisi Sukabumi. Selama bersekolah di Sukabumi, Gatot Subroto mendapatkan pendidikan khusus Marsose, yaitu pasukan gerak cepat yang dibentuk berdasarkan Dekrit Raja Belanda nomor 48 tertanggal 26 Oktober 1814.<sup>16</sup> Gatot Subroto menempuh pendidikan Polisi di Sukabumi selama dua tahun. Pada 1936 ia ditugaskan di *Meester Cornelis* (saat

<sup>14</sup> Petrik Matanasi, *Bumiputera Jadi Letnan KNIL*, (Yogyakarta: Trompet, 2011), hlm. 10.

<sup>15</sup> A. B. Lopian, Susanto Zuhdi dan Shalfiyanti, *Terminologi Sejarah 1945-1950*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 124.

<sup>16</sup> Petrik Matanasi, *op. cit.*, hlm. 21.

<sup>12</sup> Koleksi Arsip Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, *Riwayat Hidup Gatot Soebroto*.

<sup>13</sup> Moh. Oemar, *Jenderal Gatot Subroto*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1976), hlm. 12.

ini dikenal sebagai wilayah Jatinegara) yang tergabung dalam kesatuan Marsose. Gatot Subroto yang memiliki pangkat Sersan Marsose bertugas untuk mengamankan daerah tersebut yang pada masa itu sering dilanda kerusuhan yang mengakibatkan rakyat menderita. Ketika Gatot Subroto bertugas harus menangkap pihak yang salah dan memprosesnya ke jalur peradilan. Seringkali ia harus melakukan tindakan tersebut terhadap rakyat kecil yang dianggap mengganggu keamanan. Gangguan keamanan dalam bentuk serangkaian kegiatan kejahatan setelah terhimpit beban ekonomi dan terjerat lintah darat. Hal inilah yang terkadang mengganggu nurani Gatot Subroto. Di lain pihak Gatot Subroto berkewajiban menyelenggarakan keamanan sesuai tugasnya di sisi lain melukai rasa kemanusiannya.<sup>17</sup>

Berangkat dari jiwa sosial yang tinggi, Gatot Subroto selalu memiliki cara-cara tersendiri untuk membantu rakyat kecil tanpa mencederai kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Gatot Subroto menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya, terutama rakyat kecil yang terhimpit beban ekonomi. Masa penugasan di Jatinegara tidak lama. Ia kemudian mengalami dua kali perpindahan. Pertama di Bekasi dan kedua di Cikarang, Jawa Barat. Penugasan di wilayah Jawa Barat bertahan hingga masa-masa menjelang datangnya Jepang ke Hindia Belanda.

Dalam rangka peningkatan pertahanan militer dan menghadapi invasi pasukan Jepang, Gatot Subroto dan pasukannya di kirim ke Ambon.<sup>18</sup> Namun, dalam waktu singkat tentara Jepang berhasil mengalahkan pertahanan pasukan KNIL di Hindia Belanda. Gatot Subroto yang masih berada di Ambon berhasil menyelamatkan diri. Melepaskan atribut militernya demi keamanan, ia meninggalkan Ambon menuju Makasar dan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Pulau Jawa.

Jepang secara resmi menduduki Hindia Belanda melalui perjanjian di Kalijati pada 8 Maret 1942. Kemudian dibentuk organisasi militer dan semi militer untuk membantu tentara pendudukan Jepang apabila terjadi penyerbuan oleh Sekutu.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional Jilid II*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, Badan Pembina Pahlawan Pusat, Proyek Pembinaan Pahlawan, 1981/1982), hlm. 98.

<sup>18</sup> A. B. Lopian, Susanto Zuhdi dan Shalfiyanti, *Loc. cit.*,

<sup>19</sup> Saat itu Jepang tengah terlibat dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik merupakan Perang Dunia II antara Jepang dan

Salah satu organisasi militer yang penting ialah pembentukan Pembela Tanah Air (PETA) pada 3 Oktober 1943 berdasarkan *Osamu Seirei* Nomor 44.<sup>20</sup> Gatot Subroto tergabung dalam pelatihan *cadandcho* atau komandan kompi bagi tentara PETA di Bogor dan kemudian bertugas di Banyumas.

Kekalahan Jepang terhadap Sekutu serta pembubaran PETA pada 22 Agustus 1945, berdampak pada karir militer Gatot Subroto. Jiwa nasionalis dalam diri Gatot Subroto menjadikannya bergabung dengan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang dibentuk pada 22 Agustus 1945, banyak anggotanya terdiri dari bekas anggota PETA. Melihat perlunya perangkat keamanan yang jelas, pada 5 Oktober 1945 dengan Maklumat yang dikeluarkan Presiden Soekarno, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kedatangan Sekutu di Indonesia untuk merebut kedaulatan menjadi tugas besar bagi TKR. Pihak Sekutu yang merasa memiliki hak yang lebih setelah berhasil mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II. Wilayah Republik Indonesia menjadi tanggung jawab penguasaan Komando Asia Tenggara Inggris di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten yang tiba di Pulau Jawa pada 29 September 1945. Pasukan Sekutu memiliki tugas untuk melaksanakan kewajiban Sekutu mengambil alih kekuasaan Jepang atas Indonesia dan mengurus tawanan perang bangsa Eropa.

Salah satu pasukan Sekutu tiba di Semarang pada tanggal 19 Oktober 1945 di bawah komando Brigadir Jenderal R. B. W. Bethell.<sup>21</sup> Begitu Sekutu mendarat, dimulailah pergerakan Sekutu untuk mengamankan tawanan perang warga Indo-Eropa dan Eropa di sepanjang rute Ambarawa-Magelang yang diperkirakan sebanyak 10.000 orang.<sup>22</sup> Pada awalnya, pergerakan Sekutu di Semarang hingga Magelang berjalan sebagaimana mestinya. Namun, mengalami perubahan yang signifikan setelah terjadi kontak senjata antara pasukan TKR dan pasukan Sekutu yang ternyata telah memiliki perjanjian

---

Amerika Serikat yang dimulai dengan penyerangan Jepang atas pangkalan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii pada 7 Desember 1941. Sekutu di sini merupakan kekuatan gabungan antara Amerika Serikat dan Inggris.

<sup>20</sup> Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1979), hlm. 73.

<sup>21</sup> A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I*, (Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung, 1977) hlm. 367.

<sup>22</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 325.

terselubung dengan pasukan Belanda untuk membantu Belanda berkuasa kembali di Indonesia pada 26 Oktober 1945.

Paska kontak senjata keadaan pasukan Sekutu terdesak hingga akhirnya secara diam-diam pasukan Sekutu meninggalkan Magelang. Pada 21 November 1945 pasukan sekutu bergerak menuju benteng pertahanan Sekutu di Ambarawa. Merespon pergerakan sekutu terdapat komando dari Markas Tertinggi di Yogyakarta untuk membentuk Markas Pusat Pertempuran yang berpusat di Magelang. Gatot Subroto yang saat itu baru masuk ditunjuk sebagai komandan front pertempuran, dan memegang komando teknis yang kemudian membagi pasukan menjadi beberapa sektor.

Ketika pertempuran Palagan Ambarawa mencapai puncaknya dengan dikeluarkan perintah penyerbuan oleh Jenderal Soedirman, Gatot Subroto mendapatkan kepercayaan sebagai penyerbu dari sektor selatan. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan di pihak TKR setelah berhasil menyerang dan menyerbu pasukan Sekutu dengan taktik Supit Urang yang dimulai pada tanggal 12 Desember hingga 15 Desember 1945. Sekutu melarikan diri menuju Semarang. Keberhasilan pertempuran ini membuat Gatot Subroto dipercaya untuk menjadi Panglima Divisi II di Purwokerto. Selama menjadi Panglima Divisi II, Gatot Subroto mendapatkan pengalaman lapangan yang baik. Terutama ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, di mana Gatot Subroto mendapatkan perintah untuk mengamankan daerah Banjarnegara untuk membantu pertahanan melawan pasukan Belanda. Gatot Subroto membagi pasukannya dalam beberapa sektor pertahanan di sekitar Cilacap, Purbalingga, Brebes dan Tegal dengan membentuk kantong-kantong pertahanan sehingga membatasi wilayah agresi sebatas kota-kota besar. Taktik tersebut berhasil dijalankan dengan baik. Paska Agresi Militer I, Gatot Subroto bertahan sebagai Panglima Divisi II di Purwokerto.<sup>23</sup> Karir Gatot Subroto dalam hierarki kemiliteran semakin baik dengan dipercaya sebagai Panglima Corps Polisi Militer (CPM) di Yogyakarta pada Maret 1948 untuk menggantikan Komodor Suryadarma.

## B. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun merupakan titik puncak perjalanan partai komunis di Republik Indonesia pada tahun 1948. Tentu dengan beberapa peristiwa yang mendahuluinya seperti disetujuinya Perjanjian Renville, dibubarkannya Kabinet Amir Syarifuddin, dilantiknya Kabinet Hatta, hijrah Divisi Siliwangi, dan kembalinya salah satu kader senior PKI yaitu

Musso pada 11 Agustus 1948.<sup>24</sup> Kembalinya Musso menghidupkan semangat kader-kader PKI muda yang sempat meredup setelah upaya-upaya yang mereka kerahkan untuk kembali ke pucuk Pemerintahan Republik Indonesia melalui Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengalami banyak kegagalan.

Kedatangan Musso ingin merubah jalannya revolusi nasional Indonesia agar sesuai dengan garis-garis pergerakan Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) yang menjadi induk organisasi dan paham yang dianut Musso selama ini. Untuk mencapai hal itu, Musso berupaya melakukan serangkaian perubahan pada gerakan komunis di Indonesia. Salah satunya ialah fusi partai komunis. Fusi partai komunis dilakukan untuk mempermudah koordinasi di bawah komando Musso. Menurut Musso pergerakan komunis hanya membutuhkan satu wadah yang mewakili seluruh kelompok komunis yaitu PKI bukan terpecah-pecah dalam beberapa kelompok. PKI berhasil memaksa terlaksananya fusi berbagai partai komunis yang sebelumnya tergabung dalam FDR untuk menjadi satu kesatuan atas nama Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>25</sup>

Geliat PKI dan FDR semakin massif dalam kancah perpolitikan Republik Indonesia. Serangkaian agitasi yang dilaksanakan oleh kelompok komunis tersebut semakin terang-terangan dalam menyerang Pemerintahan Kabinet Hatta. Pergerakan PKI dan FDR juga merambah pada tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat itu tengah melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi (Rera)<sup>26</sup> dan hijrahnya Divisi Siliwangi

<sup>24</sup> Musso salah satu dalang dari peristiwa pemberontakan oleh PKI menentang Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda tahun 1926 di Banten, Batavia dan Priangan. Musso melarikan diri ke Moskow dan mendapatkan indoktrinasi ulang mengenai PKI. Slamet Muljana. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. (Yogyakarta: :LkiS, 2008), hlm. 220.

<sup>25</sup> PKI pada awalnya hanya memiliki 3000 orang anggota. Setelah adanya fusi, diperkirakan terdapat sekitar 15.000 anggota baru yang bergabung berasal dari Partai Sosialis dan Partai Buruh. Belum lagi 100.000 orang Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo). Harry A. Poeze, *Madiun 1948 PKI Bergerak*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV Jakarta, 2011), hlm. 72.

<sup>26</sup> Reorganisasi dan rasionalisasi TNI merupakan kebijakan Kabinet Hatta untuk mengecilkan dan menyederhanakan kekuatan dan organisasi tentara untuk meminimalisir beban yang harus ditanggung negara dalam pembiayaan angkatan perang. Mohammad Hatta, "Keterangan Pemerintah Kepada Badan Pekerja KNI Pusat

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

ke Surakarta. Memanfaatkan keadaan, kelompok kiri membangun konflik antara Divisi Siliwangi dan Divisi Panembahan Senopati di Surakarta. Konflik antar kesatuan tentara di Surakarta ini menjadi awal dari serangkaian puncak pemberontakan PKI di Madiun September 1948.

Ketegangan kemudian terjadi di Surakarta yang sebelumnya menjadi basis FDR. Divisi IV Panembahan Senopati pimpinan Sutarto yang memiliki kedekatan dengan sayap kiri memutuskan untuk melancarkan protes dan kampanye menentang Rera. Situasi di Surakarta kembali memanas setelah pada 2 Juli 1948, Kolonel Sutarto meninggal secara misterius setelah ditembak oleh orang tidak dikenal. Banyak desas-desus yang tersebar mengenai kematian kolonel Sutarto salah satunya ialah kematian Kolonel Sutarto adalah pekerjaan Divisi Siliwangi pimpinan Letkol. Sadikin.

Pembunuhan Kol. Sutarto mengawali serangkaian kekacauan militer di Surakarta. Aksi balas membalas antar kesatuan terjadi. Dimulai dengan peristiwa Tasikmadu, Srumbatan, hingga penyerangan markas Pesindo. Serangkaian peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus hingga September 1948. Aksi serang antara Pasukan Panembahan Senopati dan Pasukan Siliwangi tidak terhindarkan lagi, sebagai dampak dari ketegangan yang terjadi sebelumnya. Pasukan Panembahan Senopati mendapat dukungan dari pihak sayap kiri karena faktor kedekatan ideologi.

Untuk menengahi pertikaian di Surakarta, Jenderal Soedirman berinisiatif untuk mengadakan perundingan damai antar pasukan yang berseteru yaitu Divisi Panembahan Senopati dan Divisi Siliwangi. Perundingan damai dilaksanakan pada tanggal 15 September 1948 bertempat di Balai Kota Surakarta. Perundingan damai tersebut berjalan alot. Untuk menengahi hal tersebut diputuskan untuk mengadakan penyelidikan atas kejadian-kejadian di Surakarta. Baik itu peristiwa Tasikmadu, Srumbatan, hingga kasus culik-menculik. Penyelidikan peristiwa-peristiwa itu menjadi tanggung jawab Panglima Corps Polisi Militer Jawa, Gatot Subroto.<sup>27</sup>

Gatot Subroto dalam penyelidikannya menegaskan bahwa aksi culik-menculik antar pasukan tentara merupakan tindakan pelanggaran atas kedaulatan angkatan bersenjata. Senada dengan

---

tanggal 16 Februari 1948”, dalam I Wangsa Widjaya dan Meutia F. Swasono (ed), *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 155.

<sup>27</sup> Hery Setya Adi, “Konflik Militer Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati di Surakarta Tahun 1948:”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 95.

perkataan Gatot Subroto, Jenderal Soedirman juga menegaskan bahwasannya tentara sebagai alat kekuasaan negara yang bertugas menjaga keutuhan Republik Indonesia, baik dalam maupun luar. Bersamaan dengan proses perundingan, situasi di Surakarta terus memburuk sehingga memaksa Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Hatta untuk mengirimkan pasukan bantuan dari Divisi Siliwangi yang berada di Yogyakarta. Pasukan bantuan dikerahkan untuk ikut menertibkan suasana dan menghentikan aksi pertempuran terbuka antara Pesindo dan Barisan Banteng. Pada akhirnya perjanjian damai yang dilaksanakan di Balai Kota untuk menyelesaikan konflik menemui jalan buntu.<sup>28</sup>

Pada tanggal 16 September 1948 bertempat di Markas Besar Angkatan Perang (MBAP) diadakan rapat antar komando tinggi militer untuk mengambil keputusan yang tepat guna meredam gejolak di Surakarta dan mengamankan kembali suasana karena serangkaian pertentangan telah memprihatinkan dan memperlemah kekuatan militer Republik Indonesia. Dalam rapat Komando Tinggi Militer di Yogyakarta diputuskan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan pertikaian antar pasukan di Surakarta ialah menempatkan sosok pemimpin tinggi militer yang tegas dan mampu mengendalikan suasana. Pemimpin militer yang dimaksud ialah Gatot Subroto.

Penunjukkan Gatot Subroto karena Gatot Subroto dinilai sosok yang paling tepat. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terpilihnya Gatot Subroto. Pertama, Gatot Subroto merupakan sosok senior militer yang telah terbukti kemampuannya dan memiliki reputasi yang baik di bidang keamanan. Kedua, Gatot Subroto dikenal sebagai figur pemimpin yang tegas. Ketiga, Gatot Subroto merupakan sosok yang antikiri.<sup>29</sup> Keempat dan terakhir, Gatot Subroto sebagai Komandan CPM telah mengetahui kondisi dan situasi di Surakarta karena ia terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus yang terjadi di Surakarta.

Pengangkatan Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Militer II wilayah Surakarta-Semarang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan pada

---

<sup>28</sup> Danar Widiyanta dan Djumarwan, “Gerakan Tentara 1947-1948: Tentara Pelajar di Sidobunder dan Pasukan Siliwangi di Surakarta”, *MOZAIK*, Vol 7, Januari 2015, hlm. 29.

<sup>29</sup> Harry A. Poeze, *op.cit*, hlm. 132.

tanggal 16 September 1948.<sup>30</sup> Gatot Subroto memiliki kewenangan penuh untuk menindak segala macam kerusuhan. Selain itu, Gubernur Militer juga berwenang untuk mengusut sebab terjadinya kerusuhan, menindak yang dianggap bersalah di pengadilan militer, dan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang dianggap tidak teratur.

Sementara itu, pada 18 September 1948, PKI telah mengambil alih Madiun, sebuah kota dengan jarak sekitar 70 kilometer di timur Surakarta dan mendeklarasikan pemerintahannya. Bersamaan dengan tibanya Gatot Subroto di Surakarta untuk menjalankan tugas barunya sebagai Gubernur Militer.

Dalam dokumen "Menginjak Perjuangan Militer Baru" oleh FDR, Surakarta ditetapkan menjadi daerah *wild west* atau daerah pengalih perhatian. Dalam mewujudkan pola tersebut telah terbagi pekerjaan dari para tokoh sentral PKI. Musso, Amir Syarifuddin, Setiadjit, Wikana dan Haryanto mengambil alih kampanye atau safari politik ke beberapa wilayah basis PKI dalam mendulang dukungan massa untuk menuntut pembubaran kabinet Hatta. Sementara di Yogyakarta, tokoh Tan Ling Djie, Abdulmajid, dan Suripno memulai rencana untuk mengambil alih Surakarta dan Madiun akan tetapi, apa yang dilakukan orang ketiga orang tersebut agak melenceng dari rencana yang telah disusun.<sup>31</sup> Namun, rencana untuk menjadikan Surakarta sebagai *wild west* tetap terwujud pada tanggal 13-16 September 1948.<sup>32</sup>

Saat berlangsungnya pertempuran di Surakarta antara pasukan-pasukan pendukung PKI-Musso dan pasukan-pasukan pendukung Pemerintah, rencana pemusatan pasukan pendukung PKI di Madiun selesai dirampungkan. Konsentrasi pasukan pendukung PKI terlaksana di bawah kontrol Brigade XXIX pimpinan Letkol. Dachlan. Kekalahan di Surakarta telah mempersempit pilihan-pilihan yang dimiliki oleh pemimpin militer di Madiun karena jelas-jelas PKI yang disalahkan atas insiden-insiden yang terjadi di Surakarta. Ditambah lagi pasukan-pasukan pendukung PKI yang masih berada di luar Madiun sulit untuk masuk.

---

<sup>30</sup> Arsip Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang No. 72/A. Mil./48*, dikeluarkan pada 16 September 1948.

<sup>31</sup> George McTurnan Kahin, *Nasionalism and Revolution in Indonesia*, (New York, USA: Cornell University Press, 1952), hlm. 287.

<sup>32</sup> Aan Ratmanto, *Kronik Tentara Nasional Indonesia 1945-1949*, (Yogyakarta: Mata Padi Publisher, 2013), hlm. 113.

Terdapat dua pilihan, pertama bahwa perjuangan PKI harus melancarkan gerak ofensif, membalas kekalahan di Surakarta dan melancarkan revolusi secara prematur baru kemudian memperluas daerah pendudukan. Kedua, menunggu Musso dan kawan-kawan menyelesaikan safari politik namun cepat atau lambat pergerakan akan dihentikan oleh pemerintah karena pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok yang dinilai meningkatkan keresahan. Sumarsono dan pemimpin Pesindo lain yang telah berada di Madiun didukung oleh Kol. Djokusujono, Letkol. Dachlan, dan Letkol. Sumatri tanpa diketahui dan disetujui oleh tokoh-tokoh PKI lain seperti Musso dan Amir Syarifuddin, secara resmi melancarkan sebuah revolusi melawan pemerintahan Republik Indonesia dengan kata lain Soemarsono memilih opsi pertama.<sup>33</sup>

Ketika perebutan Madiun oleh PKI terjadi, para pimpinan utama PKI tengah berada di Purwodadi, sebuah daerah di timur Semarang untuk melaksanakan safari politiknya. Sedianya Musso akan berbicara dihadapan massa PKI. Namun, mengetahui kawan-kawannya telah melaksanakan revolusi di Madiun, segeralah rombongan Musso menuju Madiun. Pada awalnya sempat akan terjadi perpecahan di tubuh PKI. Hal ini terjadi karena Musso menganggap Sumarsono terburu-buru. Musso masih menaruh harapan yang tinggi untuk melaksanakan revolusi dengan jalan parlementer dan mengumpulkan dukungan massa. Perubahan terjadi ketika sampai di Madiun dan melihat bendera merah berkibar di sepanjang jalan, keraguan Musso pun lenyap. Musso menyadari bahwa mereka tidak dapat menempuh jalan lain.

Sejak tanggal 19 September 1948, PKI berhasil menguasai daerah yang cukup luas. Pemerintahan Front Nasional telah menancapkan kekuasaannya hingga Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Purwantoro, Wonogiri, Sukoharjo, Ngawi, Cepu, Blora, Purwodadi, dan daerah-daerah di sekitarnya. Tidak hanya menguasai kota-kota tersebut, pasukan PKI juga melakukan teror-teror di luar batas kewajaran hingga melakukan pembantaian untuk mengganti pemerintahan sipil yang menjadi pendukung pemerintahan Republik Indonesia dengan kader-kader PKI.<sup>34</sup> Pemberontakan bersenjata oleh PKI ini tentu saja mendapatkan dukungan dari organisasi paramiliter yang berafiliasi dengan PKI baik itu Brigade XXIX maupun anggota Pesindo. Kedua kekuatan

---

<sup>33</sup> George McTurnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 290.

<sup>34</sup> TEMPO, *Musso: Si Merah di Simbang Republik*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hlm. 98.



militer pemberontak mendapatkan sebutan sebagai Tentara Merah. Di Madiun dan sekitarnya PKI berhasil menempatkan beberapa pasukan militer sebagai alat pertahanan yang bersenjata lengkap dan memiliki kemampuan tempur cukup baik.<sup>35</sup>

### C. Peranan Gatot Subroto Dalam Penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948

Gatot Subroto yang diangkat sebagai Gubernur Militer II Daerah Militer wilayah Semarang Surakarta memiliki peran penting dalam upaya menumpas pemberontakan PKI di Madiun 1948. Melalui Instruksi Wakil Presiden, diketahui tugas-tugas yang harus segera dilaksanakan oleh Gatot Subroto.<sup>36</sup> Di antaranya adalah mengembalikan keamanan dan keselamatan rakyat, menyempurnakan reorganisasi-rasionalisasi Angkatan Perang di Surakarta dan Semarang, membersihkan wilayah Surakarta dan Semarang dari golongan-golongan bersenjata yang melanggar hukum, memperkuat pertahanan dan memperkuat kedudukan Pemerintah Republik Indonesia.

Usaha yang dilakukan Gatot Subroto untuk menormalisasi keamanan di Surakarta diwujudkan melalui pengumuman Gubernur Militer. Peraturan pertama yang dikeluarkan oleh Gatot Subroto ialah Pengumuman Gubernur Militer No. 1 dikeluarkan pada tanggal 18 September 1948.<sup>37</sup> Pengumuman tersebut memuat perintah untuk menghentikan aksi tembak-menembak (*cease fire*) paling lambat 20 September 1948 pukul 12:00 WIB antara pasukan pendukung PKI/Musso yang meliputi Pasukan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang didukung sebagian Pasukan Divisi Panembahan Senopati terutama yang bersal dari Tentara Laut Indonesia (TLRI) dan Pasukan pendukung Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Pasukan Divisi Siliwangi yang didukung oleh Barisan Banteng. Selain itu diwajibkan bagi setiap komandan-komandan seluruh pasukan untuk melapor kepada Gubernur Militer Gatot Subroto di kantor Karesidenan Surakarta

sebagai tanda kesetiaannya kepada Republik Indonesia.

Pengumuman No. 1 juga bertujuan untuk memisahkan pasukan-pasukan mana saja yang merupakan pendukung PKI/Musso agar segera dapat diambil tindakan. Melalui peraturan tersebut dapat diketahui pasukan-pasukan mana yang masih setia terhadap Republik Indonesia dan yang telah mengkhianati Republik Indonesia dengan mendukung pemberontakan. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Pengumuman No. 1 terdapat beberapa pasukan tentara yang akhirnya teridentifikasi sebagai pasukan pendukung pemberontak dikarenakan komandan-komandan pasukan ini tidak melaporkan keadaannya kepada Gubernur Militer. Di antaranya ialah pasukan TLRI yang dipimpin oleh Yadau, pasukan bersenjata oleh Suyoto dan pasukan yang dikepalai oleh Lenan Kolonel (Letkol.) Dachlan.<sup>38</sup> Mengetahui hal tersebut, Gubernur Militer Gatot Subroto mengumumkan hal tersebut kepada khalayak, bahwa pasukan Yadau dan Suyoto bukan merupakan bagian dari tentara Republik Indonesia lagi. Apabila masyarakat mengetahui informasi pasukan tersebut diharapkan untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib di wilayah Surakarta. Instruksi tersebut tercantum dalam pengumuman No. 3 yang dipublikasikan pada 20 September 1948 bersamaan dengan perintah Gubernur Militer DM II kepada seluruh rakyat Surakarta untuk tetap setia kepada Pemerintahan Republik Indonesia dan berpartisipasi dalam pemulihan keadaan di Surakarta.

Gubernur Militer diperbolehkan untuk menggunakannya untuk kepentingan keamanan asalkan tidak melakukan perubahan atas susunan struktur yang telah ada dan membentuk institusi baru. Berkaitan dengan instansi militer, kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer Gatot Subroto ialah memberlakukan jam malam. Kebijakan tersebut dikukuhkan dalam Pengumuman No. 8 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 1948 dan mulai berlaku sejak 27 September 1948.<sup>39</sup> Jam malam dimulai pada pukul 19:00 hingga 05:00 berlaku bagi seluruh anggota Angkatan Perang yang berada di wilayah Daerah Militer II baik Sub Teritori Command (STC) Surakarta hingga Semarang, KKM Surakarta dan KKM Boyolali. Apabila kedapatan melanggar aturan ini maka akan diambil tindakan keras. Pemberlakuan jam malam bagi anggota Angkatan Perang ini bertujuan untuk memudahkan kontrol atas aktivitas militer di seluruh wilayah Surakarta-Semarang dan meminimalisir pergerakan hingga infiltrasi pasukan tidak dikenal

<sup>35</sup> Himawan Soetanto, *Yogyakarta: Jenderal Spoor versus Jenderal Soedirman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 211.

<sup>36</sup> Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, berisi *Instruksi Wakil Presiden bagi Gubernur Militer Surakarta dan Semarang tertanggal 16 September 1948*.

<sup>37</sup> Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8: Pemberontakan PKI 1948*, (Bandung: DISJARAH AD-Penerbit Angkasa, 1979), hlm. 297.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 299.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 301.

statusnya menuju wilayah ini.<sup>40</sup> Selain itu, melalui Pengumuman No. 9 Gubernur Militer memberikan pengarahan agar segala aktifitas yang menggunakan angkutan terutama angkutan kereta api agar melaporkan kegiatannya kepada staf pengangkutan Gubernur Militer.

Untuk sipil, kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Militer cukup beragam.<sup>41</sup> *Pertama*, berkaitan dengan perkembangan pemberontakan PKI di Madiun yang didukung oleh organisasi massa dan badan perjuangan yang berafiliasi dengan PKI termasuk yang bertempat di Surakarta, Gubernur Militer melarang aksi penangkapan, penggeledahan, dan penahanan oleh partai politik, organisasi massa, dan badan perjuangan karena tugas-tugas tersebut merupakan kuasa negara dan kewenangan berada di tangan pihak berwajib dalam hal ini menjadi tanggungjawab Residen Surakarta, Walikota Surakarta, Kepolisian Negara, Komandan Kota Militer dan Polisi Militer Detasemen III. *Kedua*, dilarangnya mengadakan arak-arakan, rapat terbuka, dan demonstrasi. *Ketiga*, penerbitan pers swasta baik dalam bentuk plakat, poster-poster, siaran, dan penerbitan harus mendapatkan izin dari kepolisian negara. Kebijakan-kebijakan tersebut wajib dipatuhi karena kebijakan tersebut dijalankan sebagaimana kebijakan militer.<sup>42</sup> Bagi yang kedapatan melanggar akan diberi sanksi militer. Dengan beberapa kebijakan yang telah dijalankan di Surakarta maka keadaan sudah dapat dikendalikan. Fokus pemerintah Republik Indonesia kini beralih pada Pemberontakan PKI di Madiun. Untuk menangani masalah Madiun, Pemerintah telah bersepakat untuk mengerahkan pasukan militer agar situasi Madiun dapat segera dikendalikan.

Jenderal Soedirman mengadakan rapat di MBT Yogyakarta Pada tanggal 20 September 1948 yang dihadiri oleh para perwira Staff tentara untuk memberikan garis besar petunjuk operasi penumpasan pemberontakan PKI. Dalam rapat militer di Markas Besar Tentara (MBT) tersebut, Jenderal Soedirman mengeluarkan Perintah Hariannya yang salah satunya berisi Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Semarang dan Surakarta diperluas wilayahnya hingga mencakup Madiun dan Pati untuk mengembalikan kedaulatan Republik. Pada tanggal 21 September 1948, Gatot Subroto mengadakan rapat siasat staff Gubernur Militer bersama para komandan pasukan yang

ditunjuk melaksanakan operasi untuk membahas dan menjelaskan strategi Jenderal Soedirman dan Kepala Staff Angkatan Perang Republik Indonesia, Kolonel A. H Nasution yang telah diputuskan di Yogyakarta. Dalam rapat siasat staff Gubernur Militer, Gatot Subroto menetapkan rencana operasi sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Brigade I3/Siliwangi KRU Z di bawah pimpinan Letkol. Sadikin akan bergerak melewati poros utama yang telah ditetapkan dan merebut Madiun. Brigade ini diperkuat Batalyon Akhmad Wiranatakusumah sebagai Batalyon pelopor yang bertugas merebut Sarangan, Batalyon Sambas Atmadinata yang bertugas merebut Madiun sebagai batalyon pemukul dan Batalyon Daeng Mohammad yang bertugas merebut Maospati. Ketiga Batalyon ini sebagai ujung tombak operasi. Pada lambung kiri bergerak melalui poros Surakarta-Sragen-Walikukun-Ngawi bergerak Batalyon Umar Wirahadikusma yang bertugas mengamankan sepanjang garis Walikukun-Ngrambe dan Magetan dan Batalyon Sentot Iskandardinata bertugas merebut Ngawi. Pasukan yang bergerak pada lambung kiri ini juga diperkuat oleh pasukan cadangan dari Batalyon Sumadi dari Komando Panembahan Senopati.
2. Brigade I2/Siliwangi KRU Z di bawah komando Kolonel Koesno Utomo akan bergerak melewati rute Surakarta-Kalioso-Gemoloh-Gundih dengan sasaran utama merebut Purwodadi. Brigade ini diperkuat oleh Batalyon Kemal Idris, Batalyon R. A. Kosasih, Batalyon Suryosumpeno, Batalyon Polisi Istimewa, dan Corps Mahasiswa.
3. Brigade tambahan dari Divisi Siliwangi bergerak melalui poros Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri-Baturetno-Giriwoyo-Punung dengan sasaran utama merebut Pacitan. Brigade ini diperkuat oleh Batalyon Nasuhi dan Huseinsyah dengan pasukan bantuan 2 kompi Mahasiswa Akademi Militer.

Dengan demikian siasat yang digunakan oleh Gatot Subroto dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun ialah penyerangan lewat pasukan komando cadangan strategis yang bergerak cepat melalui tiga titik yang telah ditentukan menuju daerah-daerah yang dianggap sebagai basis-basis kekuatan PKI. Menggunakan kekuatan Batalyon Sambas sebagai pemukul yang bergerak menuju sasaran utama yaitu Madiun dilindungi dari sisi kiri dan kanan. Pengerahan pasukan cadangan strategis yang bergerak cepat dimaksudkan agar dapat menguasai Madiun dalam

<sup>40</sup> Pusat Sejarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948*, (Jakarta: Pusat Sejarah TNI bekerjasama dengan Yayasan Citra Bangsa (YKB), 2009), hlm. 29.

<sup>41</sup> Abdul Haris Nasution, *op.cit.*, hlm. 304.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 305.

<sup>43</sup> Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno "Rebut Kembali Madiun...": Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Musso 1948*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 171.

waktu singkat dengan meminimalisir pertempuran dalam perjalanan dan penggunaan rute tersingkat. Penguasaan Madiun akan mempersempit pilihan yang dimiliki pasukan pemberontak sebelum didesak menuju *killing ground* (daerah penghancuran) dan dipaksa menyerah.<sup>44</sup>

Operasi penumpasan Pemberontakan PKI di Madiun dimulai pada tanggal 25 September 1948. Pasukan KRU-Z berangkat dari Tawangwangu yang ditetapkan sebagai titik awal operasi dan berhasil masuk ke Sarangan serta melakukan pengamanan dengan sukses. Di wilayah ini, Kolonel Sadikin selaku komandan Brigade memberikan perintah Batalyon Akhmad Wiranatakusumah untuk bergerak menuju Pacitan, Batalyon Daeng bergerak menuju Maospati, dan Batalyon Umar Wirahadikusuma menuju Ngrambe-Penekan-dan Magetan, sehingga pasukan yang bergerak menuju Madiun tersisa satu batalyon yaitu Batalyon Sambas.

Strategi pimpinan PKI ialah menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Republik Indonesia dan mengundurkan diri menuju area pegunungan Wilis untuk mempersiapkan basis gerilya jangka panjang. Pimpinan PKI beranggapan bahwa pelarian menuju Gunung Wilis dapat mempertahankan kedudukannya dan mempertahankan sisa-sisa pasukannya untuk menunggu Agresi Militer Belanda yang diperkirakan oleh mereka akan dilancarkan pada 1 Januari 1949. Pemimpin PKI berharap dengan memanfaatkan momentum Agresi Militer Belanda dapat digunakan untuk memperbaiki posisi dan strategi mereka.<sup>45</sup> Namun, prediksi mereka keliru, karena pasukan TNI datang lebih cepat. Pasukan PKI pimpinan Djoko Sujono meninggalkan Madiun menuju Dungus (wilayah yang dipersiapkan sebagai basis gerilya di lereng Gunung Wilis) dengan membawa seluruh tawanan penting pimpinan militer seperti Kolonel Marhadi, Letkol. Wiyono, Mayor Bismo, dan Kapten Kartidjo.<sup>46</sup>

Pada tanggal 30 September 1948 pukul 16:15, Madiun berhasil direbut oleh TNI. Tindakan pengamanan segera dilakukan pada objek-objek vital di Madiun, seperti Radio Republik Indonesia, stasiun kereta api, alun-alun kota, serta pembebasan tahanan PKI. Pemberontak PKI tidak dapat mempertahankan kembali wilayah Madiun karena terdapat perpecahan di kalangan pemimpinnya.

<sup>44</sup> Pusat Sejarah TNI, *op. cit.*, hlm. 75

<sup>45</sup> George McTurnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 299.

<sup>46</sup> Himawan Soetanto, *Madiun dari Republik ke Republik*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006), hlm. 174.

Selain itu, disebabkan oleh tertangkapnya Letkol. Dachlan selaku Komandan Brigade XXIX, yang merupakan pasukan utama penggerak di wilayah Madiun, ketika berkunjung di rumah Letkol. Surachmat untuk mempengaruhinya mendukung Pemberontakan PKI pada tanggal 19 September 1948.

Setelah Madiun jatuh, disusul daerah-daerah lain yang sebelumnya menjadi basis kekuatan PKI seperti Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, dan Cepu. Pada dasarnya operasi penumpasan Pemberontakan PKI ini memiliki dua prinsip yang utama. Pertama, merebut Madiun yang menjadi sasaran utama baik secara strategis maupun politis. Kedua, pengejaran seluruh pendukung pemberontakan baik sipil, pasukan tentara hingga organisasi masyarakat baik sipil maupun biro perjuangan. Jadi apabila sasaran utama dalam hal ini madiun berhasil dikuasai kembali oleh TNI maka, langkah selanjutnya ialah pengejaran pendukung pemberontakan yang menolak untuk menyerahkan diri. Tidak mengherankan apabila ketika operasi pengejaran ini telah selesai dilaksanakan, terdapat banyak orang yang teridentifikasi sebagai simpatisan pemberontak PKI yang ditahan oleh TNI.

Hal tersebut sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan oleh Gubernur Militer Gatot Subroto. Setelah Madiun berhasil dikuasai tugas TNI selanjutnya ialah mengejar pasukan pemberontak dan mengamankannya. Maklumat tersebut tertuang dalam Pengumuman No.11. Dalam pengumuman tersebut diinstruksikan beberapa hal.<sup>47</sup> Pertama, pengejaran pemberontakan untuk terus dilaksanakan. Kedua, apabila dalam pengejaran pasukan pemberontak ditemukan pasukan pemberontak yang menyerahkan diri, penyerahan hanya akan diterima bila penyerahan dilakukan tanpa syarat. Ketiga, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemberontak baik penembakan misterius, penembakan dari belakang, pembunuhan massal, pembantaian, dan lainnya untuk dapat diberikan hukuman yang berat. Keempat, pemberontak yang kedapatan melakukan sabotase, bumi hangus, dan perampokan harus dikenai hukuman sesuai dengan adat pertempuran. Maklumat ini disampaikan pada tanggal 30 September 1948 pukul 22:00.

Untuk menegaskan instruksi yang berkaitan dengan penyerahan diri pasukan pemberontak yang ingin kembali bergabung dengan Republik Indonesia, Gubernur Militer mengeluarkan Pengumuman No. 13 yang berisi tentang kriteria pengampunan.<sup>48</sup> Pertama, diharuskan untuk menghadap komandan pasukan TNI terdekat dengan

<sup>47</sup> Abdul Haris Nasution, *op.cit.*, hlm. 327.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 331.

membawa bendera putih, senjata tidak terhunus, dan senjata api yang dimiliki untuk dihadapkan ke bawah. Kedua, apabila lebih dari satu orang yang datang menghadap, kelompok harus datang dalam formasi militer dengan pangkat tertinggi diantaranya menjadi penanggung jawab. Ketiga, senjata-senjata yang dibawa ketika melakukan penyerahan diri harus diserahkan pasukan TNI. Keempat, penyerahan senjata harus dilakukan secara menyeluruh baik yang disembunyikan maupun tidak. Kelima, kepada komandan pasukan TNI diberitahukan bawa bila syarat-syarat penyerahan diri diikuti maka wajib menjamin hidup pasukan pemberontak tersebut. Namun, bila tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan maka harap dilakukan pengejaran. Atas instruksi yang disampaikan oleh Gubernur Militer Gatot Subroto bahwa pemberontak yang tertangkap di medan pertempuran dan tidak melakukan penyerahan diri secara sukarela maka dapat dihukum sesuai ketentuan adat pertempuran.

Pengejaran pendukung pemberontak berhasil mengamankan pasukan-pasukan utama pendukung pemberontak di bawah komando Maladi Jusuf dan Djoko Sujono. Musso berhasil dieksekusi dan Amir Syarifuddin ditangkap sebelum akhirnya dieksekusi di depan umum. Menyusul pemimpin-pemimpin pemberontakan, TNI berhasil mengamankan sekitar 35.000 simpatisan PKI yang sebagian besar merupakan tentara regular dan anggota biro perjuangan. Ditangkapnya sebagian besar simpatisan, mengakiri perkembangan PKI di tahun 1948.

Dalam tanggung jawabnya sebagai komando operasi penumpasan pemberontakan, Gatot Subroto berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Madiun dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pergerakan yang disusun dan dikoordinasikan dengan baik telah meminimalisir jatuhnya korban dari pihak TNI. Hal ini menandakan koreksi internal yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Militer Gatot Subroto telah memperbaiki mental kesatuan TNI dan TNI masih sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Terlebih lagi, operasi penumpasan ini telah mengamankan pihak-pihak yang bersalah, terlibat baik secara langsung maupun dibalik layar pemberontakan PKI yang keji.

## KESIMPULAN

Gatot Subroto merupakan tentara yang memiliki karir kemiliteran dalam tiga zaman, yaitu kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Lahir sebagai anak seorang guru, menjadikan Gatot Subroto mendapat pendidikan yang baik sedari kecil. Menginjak usia remaja, Gatot Subroto memilih untuk menjadi tentara dengan mengikuti pendidikan militer yang telah membentuknya menjadi sosok prajurit yang tegas, disiplin, dan konsekuen. Selain itu, dengan

latar belakang militernya, baik pendidikan maupun pengalaman di lapangan, Gatot Subroto mendapat jabatan-jabatan strategis dalam hierarki militer Republik Indonesia dan memberikan kontribusi serta loyalitas kepada Republik Indonesia ketika negara benar-benar membutuhkan jasanya.

Pada tahun 1948, kondisi politik Indonesia masih fluktratif. Suhu politik meningkat seiring dengan lajunya perkembangan salah satu ideologi politik yang tengah meningkat, yaitu komunis. Kelompok kiri memanfaatkan situasi untuk kembali ke pucuk pemerintahan. Salah satunya dengan menciptakan konflik antar kesatuan militer. Perpecahan di kalangan militer pada akhirnya menjadi arena pertempuran terbuka di Surakarta. Pertempuran terbuka di Surakarta merupakan salah satu agenda kaum komunis dalam rangka mengalihkan dari aksi utama yang telah dipersiapkan di Madiun. Peristiwa di Surakarta merupakan pertempuran pembuka antara militer Republik Indonesia dan kelompok militer pendukung PKI yang berlanjut dengan pemberontakan bersenjata oleh PKI di Madiun dengan diumumkannya Pemerintahan Front Nasional. Penyelesaian pertikaian tersebut dilakukan dengan penunjukan Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer II Daerah Militer Surakarta-Semarang oleh Presiden Soekarno. Gatot Subroto bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi Surakarta agar lebih kondusif dengan pemerintahan militer di bawah komandonya.

Melalui jabatan sebagai Gubernur Militer II dengan segala kewenangannya, mempertegas peran Gatot Subroto dalam upaya untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Gatot Subroto dalam memimpin pemerintahan militer di Surakarta cenderung bersifat tangan besi melalui peraturan-peraturan yang dijalankan dengan tegas dan konsekuen. Bersamaan dengan tanggung jawab untuk mengendalikan keamanan Surakarta, Gatot Subroto juga mendapatkan perintah untuk melaksanakan operasi penumpasan Pemberontakan oleh PKI di Madiun lewat Perintah Harian Jenderal Soedirman.

Lewat rapat staff Gubernur Militer di Surakarta diputuskan bahwa operasi penumpasan dilaksanakan oleh Komando Reserse Umum (KRU) Z dari Divisi Siliwangi dan bantuan dari beberapa divisi lainnya. KRU-Z dalam pelaksanaan operasi penumpasan diwajibkan untuk melaporkan perkembangan jalannya operasi penumpasan kepada Gubernur Militer Gatot Subroto selaku penanggung jawab operasi penumpasan. Gatot Subroto berhasil membawa TNI menyelesaikan tugas penumpasan dengan baik menggunakan siasat penyerangan secara cepat dari tiga titik yang telah ditentukan dan dilanjutkan pengejaran. Keberhasilan operasi penumpasan pemberontakan ditunjukkan dengan menguasai madiun dalam waktu yang relatif singkat,

meminimalisi jatuhnya korban dari kalangan TNI hingga membabat habis kelompok anggota pemberontak PKI. Di bawah komando Gatot Subroto, TNI berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai satu-satunya kekuatan negara di wilayah

timur yang berhasil menumpas pergerakan komunis tanpa bantuan dari negara lain. Operasi penumpasan Pemberontakan PKI yang dilaksanakan dalam waktu singkat ini juga berhasil membuktikan kekuatan TNI dapat diperhitungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Arsip Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Panglima Tertinggi Angkatan Perang No. 72/A. Mil./48*. dikeluarkan pada 16 September 1948.

Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, berisi *Instruksi Wakil Presiden bagi Gubernur Militer Surakarta dan Semarang tertanggal 16 September 1948*.

Koleksi Arsip Komando Daerah Militer IV/Diponegoro, *Riwayat Hidup Gatot Soebroto*.

### Buku

Aan Ratmanto, *Kronik Tentara Nasional Indonesia 1945-1949*, Yogyakarta: Mata Padi Publisher, 2013

Abdul Haris Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I*, (Bandung: Disjarah-AD dan Penerbit Angkasa Bandung, 1977) hlm. 367.

\_\_\_\_\_, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8: Pemberontakan PKI 1948*, Bandung: DISJARAH AD-Penerbit Angkasa, 1979.

Departemen Sosial Republik Indonesia, *Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional Jilid II*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, Badan Pembina Pahlawan Pusat, Proyek Pembinaan Pahlawan, 1981/1982.

Daliman, A., *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Ginandjar Kartasasmita, dkk., *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1997.

Gottschalk, Louis, "Understanding History", terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.

Kahin, George McTurnan., *Nasionalism and Revolution in Indonesia*, (New York, USA: Cornell University Press, 1952.

Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Himawan Soetanto, *Perintah Presiden Soekarno "Rebut Kembali Madiun...": Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Musso 1948*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

\_\_\_\_\_, *Madiun dari Republik ke Republik*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006.

\_\_\_\_\_, *Yogyakarta: Jenderal Spoor versus Jenderal Soedirman*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Julianto Ibrahim, *Dinamika Sosial dan Politik Masa Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2014.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Lapian, A. B., Susanto Zuhdi dan Shalfiyanti, *Terminologi Sejarah 1945-1950*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Leclerc, Jacques., *Amir Sjarifuddin: Antara Negara dan Revolusi*, (Jakarta: Jaringan Kerja Budaya, 1996), hlm. 25.

McTurnan Kahin, George, *Nasionalism and Revolution in Indonesia*, New York, USA: Cornell University Press, 1952.

Moh. Oemar, *Jenderal Gatot Subroto*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1976.

Mohammad Hatta, "Keterangan Pemerintah Kepada Badan Pekerja KNI Pusat tanggal 16 Februari 1948", dalam I Wangsa Widjaya dan Meutia F. Swasono (ed), *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.

Moedjanto, G., *Indonesia Abad Ke-20 dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III*, Yogyakarta: Penerbit Kanisus, 1988.

Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979.

Petrik Matanasi, *Bumiputera Jadi Letnan KNIL*, Yogyakarta: Trompet, 2011.

Pusat Sejarah TNI, *Komunisme di Indonesia Jilid II: Penumpasan Pemberontakan PKI 1948*, Jakarta: Pusat Sejarah TNI bekerjasama dengan Yayasan Citra Bangsa (YKB), 2009.

Poeze, Harry A., *Madiun 1948 PKI Bergerak*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV Jakarta, 2011

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, 2011.

Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan Gunung Sahari, 1984.

TEMPO, *Musso: Si Merah di Simping Republik*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.

Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta, UGM Press, 2005.

### Skripsi

Hery Setya Adi, "Konflik Militer Divisi Siliwangi dengan Divisi Panembahan Senopati di Surakarta Tahun 1948:", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

### Jurnal

Danar Widiyanta dan Djumarwan, "Gerakan Tentara 1947-1948: Tentara Pelajar di Sidobunder dan Pasukan Siliwangi di Surakarta", *MOZAIK*, Vol 7, Januari 2015.



Yogyakarta, 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing TAS

Danar Widiyanta, M.Hum.  
NIP. 19681010 199403 1 001

Reviewer

Dina Dwikurniarini, M.Hum.  
NIP. 19571209 198702 2 001